



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARDIANSYAH SULAIMAN**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **759589**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.750.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/96 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 2.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 20.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/200 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/172 m2 di KAB / KOTA KUTAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 652.000.000**

1. MOTOR, HONDA K1H02N14L0AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



2. MOTOR, HONDA D1B02N26L2AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
635.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 306.015.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.783.015.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.783.015.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.